



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAZEL FATRA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 724855

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.270.000.000

1. Tanah Seluas 567 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah Seluas 9.386 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 397 m2/13 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 449 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.000.000

1. MOBIL, SUZUKI AV1414FSDX(4X2)M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO HONDA/X1H02N35M1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.688.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 162.000.000

Sub Total Rp. 1.582.188.000

**III. HUTANG**

Rp. 92.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.490.188.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NELLI ROSMAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 879955

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.195.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.500.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/100 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	378.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.621.200.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.621.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NADHIA AMELIA SHIBLY
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 750240

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	178.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. MOTOR, HONDA SQOPPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.000.000
Sub Total	Rp.	697.100.000
III. HUTANG	Rp.	60.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	637.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.